

Peran Koperasi Merah Putih Dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi

Feni Yulia^{1*}, Hendra Riofita²^{1,2} Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*Corresponding Author:  feniyulia9@gmail.com**Info Artikel****Sejarah Artikel:****Diterima:**

25 April 2026

Direvisi:

30 April 2026

Disetujui:

15 Mei 2026


Kata Kunci:

Koperasi Merah Putih, Ketimpangan Sosial Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Inklusif.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Koperasi Merah Putih dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan publikasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, perluasan akses permodalan, serta penguatan usaha mikro dan kecil. Selain itu, koperasi juga berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif dengan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, implementasi koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas manajemen, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar koperasi dapat berfungsi secara optimal dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.

How to Cite:Yulia, F., & Riofita, H. (2026). Peran Koperasi Merah Putih Dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Vokasi Raflesia*, 6(1), 52-59. <https://doi.org/10.53494/jpvr.v6i1.1353>**Penerbit:**

Politeknik Raflesia

 jpvrarflesia@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ini ditandai oleh adanya perbedaan yang signifikan dalam hal pendapatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, serta kualitas hidup antar kelompok masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kondisi tersebut apabila tidak ditangani secara serius dapat memunculkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, melemahkan kohesi sosial, serta menghambat tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ketimpangan sering kali muncul akibat distribusi sumber daya yang tidak merata serta terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap modal, pendidikan, dan kesempatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan instrumen ekonomi yang mampu menjangkau lapisan masyarakat paling bawah secara langsung. Salah satu instrumen yang secara historis dan teoritis dianggap relevan dalam mengurangi ketimpangan adalah koperasi. Koperasi sebagai bentuk usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas bisnis kapitalistik, karena menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan (user-owned enterprise).

Di Indonesia, koperasi telah lama menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan



masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. Namun dalam praktiknya, kontribusi koperasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan usaha. Seiring dengan dinamika tersebut, pemerintah Indonesia mendorong penguatan koperasi berbasis desa melalui program Koperasi Merah Putih. Program ini diposisikan sebagai strategi pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan berbagai kajian, Koperasi Merah Putih diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan akses permodalan, dan perluasan kesempatan usaha berbasis potensi lokal.

Secara konseptual, Koperasi Merah Putih dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas (*community-based economy*). Pendekatan ini sejalan dengan teori ekonomi kerakyatan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, pendekatan *state-centered development* juga menunjukkan bahwa peran negara masih sangat penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pasar dan modal. Dalam praktiknya, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan ketimpangan, seperti rendahnya pendapatan masyarakat desa, terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal, serta ketergantungan ekonomi pada sektor informal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan modal usaha, dan pengembangan kewirausahaan lokal. Bahkan, koperasi juga berperan dalam membangun modal sosial yang menjadi fondasi penting dalam keberlanjutan ekonomi komunitas.

Selain itu, Koperasi Merah Putih juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, koperasi dapat menjadi jembatan bagi kelompok masyarakat marginal, seperti petani kecil, nelayan, dan pelaku usaha mikro, untuk memperoleh akses terhadap pasar, teknologi, dan pembiayaan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat redistribusi kesejahteraan. Namun demikian, implementasi Koperasi Merah Putih tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi, yang berdampak pada efektivitas manajemen usaha. Selain itu, terdapat juga masalah ketergantungan terhadap dana pemerintah yang dapat menghambat kemandirian koperasi dalam jangka panjang. Tantangan lain adalah potensi tumpang tindih dengan lembaga ekonomi desa lainnya seperti BUMDes, yang dapat menimbulkan inefisiensi kelembagaan jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif juga menuntut koperasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Digitalisasi ekonomi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta integrasi pasar global menuntut koperasi untuk lebih inovatif dan adaptif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan jaringan pemasaran menjadi sangat penting agar koperasi dapat berdaya saing tinggi.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada implementasi kebijakan, kualitas pengelolaan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis sejauh mana peran Koperasi Merah Putih dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian mengenai "Peran Koperasi Merah Putih dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi" menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dan pengelola koperasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia.

KAJIAN TEORI

1. Teori Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam perspektif ekonomi, koperasi dipahami sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya secara bersama-sama, di mana keuntungan yang diperoleh dibagikan secara adil berdasarkan partisipasi anggota. Teori koperasi juga menekankan pentingnya nilai-nilai solidaritas, partisipasi, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, koperasi dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah karena memberikan akses terhadap modal, pasar, dan pelatihan usaha. Oleh karena itu, koperasi memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

2. Teori Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi dan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Menurut Mubyarto, ekonomi kerakyatan menekankan pada penguatan sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) sebagai basis utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam teori ini, negara memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil agar tidak terpinggirkan oleh dominasi ekonomi besar. Koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan berfungsi sebagai alat distribusi ekonomi yang adil serta sarana pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, pendekatan ekonomi kerakyatan menjadi dasar utama dalam mendorong partisipasi masyarakat desa agar mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi secara kolektif.

3. Teori Ketimpangan Sosial Ekonomi

Ketimpangan sosial ekonomi merujuk pada kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan, kekayaan, dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan dapat terjadi akibat perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena menurunkan daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan sosial. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah koefisien Gini (Gini Ratio), yang menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dalam suatu negara. Dalam konteks pembangunan, upaya mengurangi ketimpangan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi hasil pembangunan yang lebih adil. Koperasi menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu mengurangi ketimpangan melalui pemerataan akses ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat bawah.

4. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar mampu mengontrol kehidupan ekonomi, sosial, dan politik mereka sendiri. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama yaitu *enabling* (menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), *empowering* (memperkuat daya masyarakat), dan *protecting* (melindungi kelompok lemah dari persaingan tidak seimbang). Dalam konteks koperasi, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, akses modal, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Koperasi Merah Putih dapat dipandang sebagai instrumen pemberdayaan karena memberikan ruang

bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, pemberdayaan melalui koperasi diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar.

5. Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif adalah konsep pembangunan yang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata. World Bank menjelaskan bahwa pembangunan inklusif menekankan pada perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penghapusan kesenjangan sosial. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat bawah. Koperasi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan inklusif karena mampu menjangkau masyarakat yang tidak terakses oleh lembaga keuangan formal. Koperasi Merah Putih, dalam konteks ini, menjadi sarana strategis untuk memperluas inklusi ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan kecil di tingkat desa.

6. Teori Modal Sosial

Modal sosial (social capital) adalah jaringan hubungan, kepercayaan, dan norma sosial yang memfasilitasi kerja sama dalam masyarakat. Menurut Robert Putnam, modal sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas institusi ekonomi dan pembangunan. Dalam koperasi, modal sosial menjadi fondasi utama karena keberhasilan koperasi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan partisipasi anggota. Koperasi Merah Putih dapat memperkuat modal sosial melalui penguatan hubungan antaranggota, transparansi pengelolaan, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan meningkatnya modal sosial, koperasi akan lebih mudah berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.

METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian studi literatur, di mana peneliti memanfaatkan berbagai buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya untuk mendukung pengumpulan data. Proses analisis data melibatkan pengamatan dan penilaian mendalam terhadap sumber-sumber bacaan tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat hasil penelitian. Subjek utama dalam penelitian ini mencakup e-jurnal, e-book, dan buku-buku pendukung lainnya. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengevaluasi studi pustaka, termasuk buku dan jurnal yang berfungsi sebagai referensi penting dalam penelitian ini. Analisis ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam dari sumber-sumber tersebut untuk mendukung temuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Literatur Riview

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
1	Afgani & Wanusmawatie (2025)	Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan	Kualitatif (studi literatur)	Kebijakan Koperasi Merah Putih berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	Mendukung peran koperasi sebagai instrumen pengurangan ketimpangan
2	Hutagaol et al. (2026)	Transformasi Ekonomi Pedesaan	Kualitatif	Koperasi mampu meningkatkan ekonomi desa dan	Relevan dalam konteks pengurangan



		Melalui Koperasi Desa Merah Putih		mengurangi kesenjangan wilayah	ketimpangan desa-kota
3	Lubis (2025)	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Program Koperasi Desa Merah Putih	Deskriptif	Program koperasi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat	Mendukung konsep pemberdayaan masyarakat
4	Jurnal Manajerial (2025)	Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi Desa	Kualitatif	Koperasi memperkuat ekonomi lokal dan membuka peluang usaha	Sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat desa
5	Ikhsan (2025)	Paradigma Baru Koperasi Desa Merah Putih	Studi literatur	Koperasi perlu inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman	Relevan dengan tantangan implementasi koperasi
6	Hutapea et al. (2024)	Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan	Kualitatif	Koperasi efektif meningkatkan kesejahteraan, namun terkendala SDM dan modal	Menjelaskan faktor penghambat koperasi
7	Napitupulu & Perkasa (2023)	Peran Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Kuantitatif/Deskriptif	Koperasi berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat	Mendukung variabel ekonomi kerakyatan
8	Sabil (2014)	Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Pembangunan	Studi literatur	Ekonomi kerakyatan penting untuk pemerataan pembangunan	Landasan teori penelitian
9	Sari & Perkasa (2023)	Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan	Kualitatif	Koperasi syariah meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Relevan dengan konsep pemberdayaan
10	Sidabukke et al. (2025)	Persepsi Generasi Muda terhadap Koperasi	Survei	Minat generasi muda terhadap koperasi masih rendah	Menjadi tantangan pengembangan koperasi

Literature review pada penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Berbagai penelitian terdahulu menjelaskan bahwa koperasi mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses modal, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, koperasi juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi inklusif dengan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Namun demikian, beberapa penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pengelolaan koperasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya inovasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas manajemen koperasi agar dapat berfungsi secara optimal dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.

PEMBAHASAN



Berdasarkan hasil literature review yang telah disusun, dapat dipahami bahwa koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi selama ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pendidikan, dan peluang usaha. Oleh karena itu, kehadiran koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kerakyatan menjadi salah satu solusi yang relevan dalam menjawab permasalahan tersebut.

Hasil kajian dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa koperasi mampu menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol et al. (2026) menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih berperan dalam mentransformasi ekonomi pedesaan melalui peningkatan produktivitas masyarakat dan penguatan usaha mikro. Hal ini sejalan dengan temuan Afgani dan Wanusmawatie (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan.

Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota. Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai alat redistribusi ekonomi yang mampu memperkecil kesenjangan pendapatan. Hal ini didukung oleh penelitian Napitupulu dan Perkasa (2023) yang menunjukkan bahwa koperasi memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberian akses permodalan dan penguatan usaha kecil.

Selain itu, koperasi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi. Lubis (2025) menjelaskan bahwa program Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri.

Lebih lanjut, koperasi juga memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Dalam hal ini, koperasi berfungsi sebagai jembatan bagi kelompok masyarakat marginal, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM, untuk memperoleh akses terhadap pasar dan pembiayaan. Syafiqah et al. (2025) menyatakan bahwa koperasi dan UMKM merupakan pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi sangat penting dalam memperluas inklusi ekonomi di tingkat desa.

Namun demikian, hasil literature review juga menunjukkan bahwa implementasi koperasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi. Hutapea et al. (2024) mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas manajemen koperasi dapat menghambat efektivitas operasional dan perkembangan usaha. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya koperasi juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi anggota.

Tantangan lainnya adalah rendahnya minat generasi muda terhadap koperasi. Penelitian Sidabukke et al. (2025) menunjukkan bahwa generasi muda cenderung kurang tertarik untuk terlibat dalam koperasi karena dianggap kurang modern dan kurang menguntungkan dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian penting, mengingat keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada regenerasi anggota dan pengelola yang inovatif.

Selain itu, koperasi juga dihadapkan pada tantangan dalam hal permodalan dan inovasi. Keterbatasan modal sering kali menjadi kendala dalam mengembangkan usaha

koperasi, sehingga koperasi sulit bersaing dengan badan usaha lain yang memiliki modal lebih besar. Ikhsan (2025) menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan koperasi, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi. Tanpa adanya inovasi, koperasi akan sulit bertahan di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif.

Di sisi lain, peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan koperasi. Kebijakan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kapasitas koperasi dalam menjalankan fungsinya. Afgani dan Wanusmawatie (2025) menegaskan bahwa intervensi negara melalui program Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Namun demikian, ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan pemerintah juga perlu dihindari, karena dapat menghambat kemandirian koperasi dalam jangka panjang.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi melalui berbagai mekanisme, seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses ekonomi, serta penguatan usaha mikro dan kecil. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan dari pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengoptimalkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan modal usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya koperasi sebagai instrumen ekonomi yang berkeadilan.

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Jika dikelola dengan baik dan didukung oleh berbagai pihak, koperasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan. Koperasi berfungsi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, perluasan akses permodalan, serta penguatan usaha mikro dan kecil. Selain itu, koperasi juga berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, efektivitas peran Koperasi Merah Putih masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya inovasi, serta keterbatasan modal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memperkuat kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas manajemen, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya koperasi.

Dengan pengelolaan yang optimal dan dukungan kebijakan yang tepat, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi solusi strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://jptam.org>
- Hutagaol, I. A., Iswati, S., & Suwarno, P. (2026). Transformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Koperasi Desa Merah Putih. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2). <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.12897>
- Hutapea, J. G., et al. (2024). Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan: Analisis Keberhasilan dan Tantangan Koperasi di Indonesia. *Jurnal Prisma Hukum*. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/5330>
- Ikhsan, H. (2025). Paradigma Baru Koperasi Desa Merah Putih. *Domain Hukum*. <https://domainhukum.com>
- Jurnal Manajerial. (2025). Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi Desa. *Manajerial*. <https://journal.umg.ac.id/index.php/manajerial>
- Lubis, I. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. *Waspada.id*. <https://www.waspada.id/opini>
- Napitupulu, N. H., & Perkasa, R. D. (2023). Peran Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8885>
- Riofita, H. (2016). Bentuk Peranan Guru Dalam Memberikan Pendidikan Kepemimpinan. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 2(1).
- Riofita, H. (2024). Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2).
- Riofita, H. (2024). Predicting Muslim Female Customer Retention Through Islamic Marketplace Attractiveness. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 234-247.
- Sabil. (2014). Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Moneter*. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/938>
- Sari, R. Y., & Perkasa, R. D. (2023). Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. *Innovative Journal of Social Science Research*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2755>
- Sidabukke, C. E., et al. (2025). Persepsi Generasi Muda terhadap Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/34085>
- Syafiqah, N. A., et al. (2025). Koperasi dan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. *IKRAITH-Ekonomika*. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/6006>

